

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Erlangga. Jakarta.
- Abdul, Halim. (2015). *Auditing: Dasar – Dasar Audit laporan Keuangan*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Unti Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Alawiyah, TT, Sumardjo, M., & Darmastuti, D. (2020). Analisis Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8 (3), 415-424.
- Agoes, S. (2017). *Auditing*, Edisi 5, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2018). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesada (2020). Teori Keagenan. Majalah Maya KSAP, Edisi 1 Oktober 2020, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). <http://www.ksap.org/sap/teorikeagenan/>. Diakses pada 10 April 2023.
- IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). (2016). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mayangsari, Sekar, dan Puspa Wandanarum. (2013). *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat*. Jakarta: Media Bangsa
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Melani, R. D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Darmajaya.
- Mustikasari, F. A. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016-2018. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Nurwati, I. dan R. Trisnawati. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Prosiding Seminar Nasional dan The 2Call for Syariah Paper*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri, Novi Kumala dan A, Mahmud. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern PEMDA. *Accounting Analysis Journal 4 (2) (2015)*. ISSN 2252- 6765.
- Purniasari, C. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 2013-2014). *Prosiding Seminar Nasional*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rachmawati. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saputro, E. A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Simanjuntak, D. N. I. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2014. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147-158.
- Tuanakotta, M. T. (2018). *Forensic Accounting and Investigative Audit*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Palembang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Utama, Prima Wardoyo Putro. (2013). Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Wandira, A. G. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY.

REFERENSI

- Bpk.go.id (2018, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 25 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2019, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 25 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2019, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 25 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2020, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 25 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2020, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 25 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2021, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 25 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2021, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 27 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2022, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 27 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2022, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 27 Maret 2023).
- Bpk.go.id (2023, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 30 Maret 2023).
- Bps.go.id (2021, Desember). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2021*. (Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021> tanggal 28 Maret 2023).
- Djpk.kemenkeu.go.id (2021, 16 Januari). *Dana Alokasi Khusus*. (Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tanggal 28 Maret 2023).
- Djpk.kemenkeu.go.id (2021). *Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah*. (Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> tanggal 29 Maret 2023).